

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Ida Farida¹

Kamelia Khasanah²

Yuni Zaroh³

Mashudi⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220721100126@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** The trade war between the United States and China, which began in 2018, has had a significant impact on the global economy, including the Islamic economy in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature review method to analyze the effect of global trade tensions on Islamic stocks in Indonesia. The study results show that the uncertainty caused by the trade war creates volatility in Islamic stock prices, especially in export and commodity-based sectors such as agriculture, energy, and mining. The decline in commodity prices, the instability of the rupiah exchange rate, and the decline in demand from China were the main factors that affected the performance of Islamic stocks. Nonetheless, the principles of Islamic finance that emphasize transparency and prudence provide a stable alternative for investors amidst uncertain market conditions. The research also underscores the importance of export market diversification and government policy incentives to support the Islamic economic sector. By adopting strategic policies, such as expanding trade relations with Middle Eastern countries and the Organization of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia can reduce dependence on major countries involved in trade wars. This study concludes that the Islamic economy has potential as a more stable investment alternative amidst complex global economic dynamics.*

Received December 03, 2024; Revised December 12, 2024; December 19, 2024

*Corresponding author: 220721100126@student.trunojoyo.ac.id

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Keywords: Trade War, Sharia Economy, Stock Market

Abstrak. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dimulai pada 2018, membawa dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review untuk menganalisis pengaruh ketegangan perdagangan global terhadap saham syariah di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang dagang menciptakan volatilitas harga saham syariah, khususnya di sektor-sektor berbasis ekspor dan komoditas seperti pertanian, energi, dan pertambangan. Penurunan harga komoditas, ketidakstabilan nilai tukar rupiah, serta penurunan permintaan dari Tiongkok menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja saham Syariah. Meskipun demikian, prinsip keuangan syariah yang menekankan transparansi dan kehati-hatian memberikan alternatif stabilitas bagi investor di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan insentif kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi syariah. Dengan mengadopsi kebijakan strategis, seperti perluasan hubungan dagang dengan negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara besar yang terlibat perang dagang. Studi ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi sebagai alternatif investasi yang lebih stabil di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.

Kata Kunci: Perang Dagang, Ekonomi Syariah, Pasar Saham

LATAR BELAKANG

Perang dagang telah menjadi salah satu fenomena yang paling mencolok dalam hubungan ekonomi internasional, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi perdagangan antar negara, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap stabilitas politik global. Ketegangan antara negara-negara ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, adalah contoh nyata bagaimana konflik ekonomi dapat memiliki konsekuensi serius bagi tatanan internasional. Perang dagang ini sering kali dipicu oleh kebijakan proteksionis, persaingan ekonomi, serta perbedaan pandangan dalam hal standar perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan akses pasar. Namun, di luar aspek ekonomi, perang dagang juga kerap dimanipulasi sebagai alat

politik, di mana propaganda memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil dari konflik tersebut.(Natalia 2020)

Perang dagang tidak hanya terbatas pada pengenaan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, tetapi juga berkaitan dengan strategi politik yang lebih luas, termasuk pengaruh geopolitik dan diplomasi ekonomi. Literatur terkait dengan perang dagang menyoroti pentingnya memahami dimensi politik yang melingkupinya. Beberapa studi menyatakan bahwa perang dagang sering kali dimotivasi oleh faktor politik, seperti keinginan untuk memperkuat posisi di panggung internasional atau melemahkan pesaing ekonomi. Hal ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global. Propaganda menjadi alat penting dalam perang dagang, terutama dalam memobilisasi dukungan domestik dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah internal. (Hadi, Malikhah, and Alfie 2020). Melalui media massa, pemerintah dapat membingkai narasi tentang perang dagang sesuai dengan kepentingan politik mereka, baik untuk memperkuat posisi negosiasi maupun untuk menjustifikasi kebijakan yang diambil.

Peran propaganda dalam perang dagang semakin terlihat jelas dalam beberapa konflik perdagangan besar, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, kedua negara menggunakan propaganda untuk memperkuat klaim mereka dan mempengaruhi persepsi masyarakat internasional. Misalnya, Amerika Serikat sering kali menggambarkan Tiongkok sebagai pelaku perdagangan yang tidak adil, yang mencuri teknologi dan merugikan pekerja Amerika. Sebaliknya, Tiongkok menggunakan narasi yang menekankan bahwa kebijakan perdagangan mereka adalah upaya untuk mempertahankan hak kedaulatan dan melindungi ekonomi domestik dari serangan eksternal. Kedua narasi ini kemudian diperkuat melalui berbagai saluran media, baik domestik maupun internasional, untuk membangun dukungan politik dan ekonomi.

Dalam memahami dampak perang dagang, penting untuk melihat bagaimana literatur sebelumnya menggambarkan hubungan antara ekonomi dan politik global. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah siyasah dauliyah, atau politik antar bangsa, yang menggarisbawahi peran penting kebijakan luar negeri dalam menentukan arah dan dampak dari konflik ekonomi. Indonesia, misalnya, telah lama menggunakan prinsip politik bebas aktif dalam hubungannya dengan negara-negara lain, termasuk dalam isu-isu perdagangan internasional(Ahyani and Slamet 2021). Literatur tentang siyasah

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

dauliyah menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dalam konteks global. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional secara aktif, sambil mempertahankan independensi politik dan ekonomi.

Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa perang dagang tidak hanya berdampak pada perekonomian negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga pada tatanan ekonomi global secara keseluruhan. Misalnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memengaruhi rantai pasokan global, mengganggu perdagangan antar negara, dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Hal ini diperkuat oleh literatur yang menyoroti dampak sistemik dari perang dagang, di mana negara-negara berkembang sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Ekonomi yang lebih kecil dan bergantung pada perdagangan internasional sering kali terjebak di antara dua kekuatan besar, sehingga harus menavigasi kebijakan mereka dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Selain dampak ekonomi langsung, perang dagang juga berkontribusi pada meningkatnya ketegangan politik di tingkat global. Propaganda yang digunakan dalam perang dagang sering kali membangkitkan sentimen nasionalis dan proteksionis, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antar negara. Literasi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan propaganda dalam konteks perang dagang tidak hanya bertujuan untuk membentuk opini publik, tetapi juga untuk memengaruhi kebijakan luar negeri dan memperkuat legitimasi domestik. Pemerintah menggunakan narasi tertentu untuk memobilisasi dukungan rakyat, yang kemudian digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi internasional. Dalam hal ini, propaganda tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang efektif.

Dalam sejarah perang dagang, kita dapat melihat bagaimana narasi propaganda sering kali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap negara-negara lain. Misalnya, selama perang dagang antara Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1980-an, media Amerika menggambarkan Jepang sebagai ancaman ekonomi yang akan merusak industri domestik Amerika (Gadis Diandono and Purbantina 2012). Propaganda ini berhasil membentuk opini publik yang mendukung kebijakan proteksionis pemerintah, seperti pengenaan tarif yang lebih tinggi dan pembatasan impor produk-produk Jepang. Hal yang

serupa juga terjadi dalam perang dagang kontemporer antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kedua negara saling menuduh satu sama lain melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Propaganda ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik global secara keseluruhan.

Namun, tidak semua perang dagang berakhir dengan peningkatan ketegangan politik atau eskalasi konflik. Ada juga contoh-contoh di mana negosiasi perdagangan yang sukses dapat meredakan ketegangan dan mengarah pada kerjasama yang lebih besar antara negara-negara yang sebelumnya berseteru (Erfan et al. 2024). Literasi tentang negosiasi perdagangan internasional menunjukkan bahwa, meskipun propaganda memainkan peran penting dalam menciptakan narasi selama perang dagang, negosiasi yang baik dapat membantu meredakan konflik dan mengembalikan hubungan yang lebih stabil. Proses ini sering kali melibatkan kompromi antara kepentingan ekonomi dan politik, serta kesediaan negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan domestik mereka guna mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, perang dagang merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya memengaruhi perekonomian, tetapi juga dinamika politik global. Propaganda, sebagai alat komunikasi dan politik, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi hasil dari konflik ekonomi ini. Meskipun dampaknya terhadap stabilitas politik global bisa sangat signifikan, literatur menunjukkan bahwa ada peluang untuk meredakan ketegangan melalui negosiasi dan diplomasi yang bijaksana. Dalam konteks ini, memahami peran propaganda dan dampak politik dari perang dagang menjadi semakin penting, terutama dalam era globalisasi yang semakin saling terkait.

KAJIAN TEORITIS

Tulis Kajian/Tinjauan Teoritis Disini (Hadi et al. 2020) Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada 2018 menjadi salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dimulai dari kebijakan tarif yang diterapkan AS terhadap barang-barang impor dari Tiongkok, perang dagang ini berkembang menjadi konflik ekonomi yang lebih luas, mempengaruhi hubungan perdagangan global dan kestabilan pasar keuangan internasional. Dalam kondisi ini, pasar saham Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lain yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan kedua negara tersebut, termasuk Indonesia, mengalami perubahan yang

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

signifikan. Sebagai negara yang memprakarsai perang dagang, Amerika Serikat merasakan dampak langsung dari ketidakpastian kebijakan perdagangan. Pasar saham AS, terutama indeks-indeks utama seperti S&P 500 dan Dow Jones, menunjukkan fluktuasi yang tinggi selama periode perang dagang 2018-2020. Setiap pengumuman kebijakan tarif baru yang diterapkan AS terhadap Tiongkok sering kali disertai dengan penurunan harga saham di pasar AS, karena investor merespons kemungkinan penurunan pendapatan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dagang signifikan dengan Tiongkok .

Volatilitas pasar saham di AS juga didorong oleh kekhawatiran akan penurunan pertumbuhan ekonomi. ketidakpastian kebijakan perdagangan yang disebabkan oleh perang dagang berdampak pada penurunan sentimen pasar. Hal ini terutama terlihat pada saham-saham di sektor teknologi dan manufaktur yang sangat bergantung pada rantai pasokan dari Tiongkok. Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas pada harga saham, tetapi juga mempengaruhi ekspektasi investor terhadap pertumbuhan ekonomi AS dalam jangka panjang. Studi ini menunjukkan bahwa kekhawatiran investor atas dampak perang dagang meningkatkan volatilitas pasar saham, yang pada gilirannya menurunkan likuiditas di pasar saham AS. Tiongkok sebagai pihak yang menjadi sasaran tarif AS juga mengalami dampak yang signifikan pada pasar sahamnya. Indeks utama seperti Shanghai Composite Index mengalami penurunan harga saham yang cukup besar sebagai reaksi terhadap ketidakpastian perdagangan dan potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik yang sangat bergantung pada ekspor ke AS. pasar saham Tiongkok mengalami volatilitas tinggi sebagai akibat dari penurunan kepercayaan investor. Ini terlihat pada penurunan harga saham di sektor-sektor yang sangat terdampak oleh tarif impor, seperti sektor teknologi, manufaktur, dan otomotif.

Sementara itu, pemerintah Tiongkok melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengurangi dampak negatif perang dagang terhadap ekonominya, termasuk memberikan insentif untuk meningkatkan konsumsi domestik dan mendiversifikasi pasar ekspor. Dalam konteks ini, kebijakan domestik yang diambil pemerintah Tiongkok, seperti penurunan suku bunga dan peningkatan investasi dalam proyek infrastruktur, berhasil mempertahankan kestabilan harga saham di beberapa sektor. Namun, secara keseluruhan, pasar saham Tiongkok tetap sangat rentan terhadap berita dan kebijakan baru yang berkaitan dengan perang dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

sentimen negatif terhadap dampak kebijakan tarif menyebabkan penurunan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pasar saham Tiongkok.

Sebagai negara berkembang dengan hubungan ekonomi yang erat dengan AS dan Tiongkok, Indonesia juga terdampak oleh ketidakpastian global yang diakibatkan oleh perang dagang ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan volatilitas yang signifikan selama periode perang dagang, terutama karena ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekspor komoditas ke Tiongkok. IHSG mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh menurunnya minat investor asing terhadap pasar saham di negara berkembang yang dianggap lebih berisiko dalam kondisi ketidakpastian global. Penurunan harga saham di pasar Indonesia terutama terlihat pada sektor komoditas, yang sangat tergantung pada permintaan dari Tiongkok. Menurut Prasetyo dan Haryanto (2021), ketegangan perdagangan AS-Tiongkok menyebabkan penurunan harga komoditas seperti batubara dan minyak sawit yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok. Penurunan permintaan komoditas ini mempengaruhi harga saham di sektor terkait, yang berdampak pada kinerja pasar saham secara keseluruhan. Selain itu, ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang membuat investor asing lebih cenderung menarik dananya dari pasar saham Indonesia, sehingga meningkatkan risiko likuiditas dan menekan pertumbuhan pasar modal di Indonesia.

Literatur juga menunjukkan adanya hubungan dinamis antara pasar saham AS, Tiongkok, dan Indonesia selama periode perang dagang 2018-2020. Volatilitas di pasar saham AS dan Tiongkok cenderung berdampak langsung pada pasar saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui transmisi volatilitas pasar global. Dalam konteks ini, fluktuasi yang terjadi di pasar saham AS atau Tiongkok akibat kebijakan tarif baru akan cenderung diikuti oleh reaksi serupa di pasar saham Indonesia. Hubungan ini menunjukkan bahwa ketiga pasar saham tersebut saling terkait dan bereaksi secara simultan terhadap ketidakpastian kebijakan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa perang dagang 2018-2020 berdampak besar terhadap pasar saham di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. Di AS, perang dagang menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar saham karena kekhawatiran akan penurunan pertumbuhan ekonomi dan gangguan rantai pasokan. Sementara itu, pasar saham Tiongkok menghadapi tantangan yang serupa akibat ketergantungan ekonominya

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

pada ekspor ke AS dan respons kebijakan domestik terhadap tarif impor. Di Indonesia, pengaruh perang dagang terutama tercermin dalam volatilitas IHSG, yang disebabkan oleh ketergantungan pada ekspor komoditas ke Tiongkok dan respons investor terhadap ketidakpastian global. Hubungan dinamis antar ketiga pasar menunjukkan adanya pengaruh spillover yang kuat, di mana ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok memiliki dampak signifikan terhadap pasar saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa perang dagang bukan hanya konflik antara dua negara, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas bagi stabilitas pasar saham global.

(Natalia 2020) Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung sejak 2018 telah memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk pada pasar saham syariah di Indonesia. Konflik ini melibatkan kebijakan tarif yang ketat dan pembatasan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi para pelaku pasar global. Dampaknya tidak hanya terasa pada pasar saham di negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga merembet ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks saham syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan berfokus pada sektor-sektor yang sesuai dengan aturan syariah, ketidakpastian global akibat perang dagang mengakibatkan fluktuasi harga yang cukup signifikan. Fluktuasi ini disebabkan oleh tekanan eksternal seperti penurunan harga komoditas dan volatilitas nilai tukar, yang berdampak pada sektor-sektor utama dalam indeks saham syariah. Saham-saham syariah di sektor pertanian dan energi di BEI cenderung mengalami penurunan nilai selama ketegangan dagang tersebut, mengingat ketergantungan sektor ini pada ekspor ke China. Selain itu, ketidakpastian ini memengaruhi sentimen investor, yang menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada saham syariah di pasar Indonesia. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa perang dagang AS-China memberikan pengaruh negatif terhadap saham syariah di BEI. Ketidakpastian perdagangan mengurangi stabilitas pasar syariah dan memengaruhi likuiditas serta minat investor dalam berinvestasi, sehingga menciptakan tantangan tersendiri bagi perkembangan saham syariah di tengah dinamika ekonomi global.

(Ahyani and Slamet 2021) Ekonomi syariah, sebagai sistem keuangan dan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, telah mengalami perkembangan pesat di

berbagai belahan dunia. Pada awalnya, sistem ini hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim, namun dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah menarik perhatian dunia Barat. Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi syariah. Literasi digital, transparansi, dan kemudahan akses terhadap teknologi keuangan (fintech) semakin memudahkan dunia Barat untuk mempelajari, mengadopsi, dan bahkan berkolaborasi dalam berbagai aspek ekonomi syariah. Dalam konteks ini, literatur memberikan pandangan beragam tentang bagaimana dunia Barat merespons ekonomi syariah di tengah kemajuan teknologi yang pesat ini. Ekonomi syariah menarik minat dunia Barat karena menawarkan sistem keuangan yang stabil dan etis, di mana transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga) dan spekulasi berlebihan. Krisis keuangan global tahun 2008 memainkan peran penting dalam meningkatkan ketertarikan negara-negara Barat terhadap ekonomi syariah, karena sistem ini menawarkan model keuangan yang berbasis pada aset nyata dan risiko yang lebih rendah. Berbagai institusi keuangan di negara-negara Barat, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, telah mendirikan cabang bank syariah atau divisi keuangan syariah untuk melayani kebutuhan nasabah Muslim maupun non-Muslim yang menginginkan opsi keuangan etis.

Beberapa literatur juga menunjukkan bahwa negara-negara Eropa, terutama Inggris, merupakan pemimpin dalam penerapan keuangan syariah di dunia Barat. Sebagai contoh, Inggris menjadi negara pertama di Eropa yang menerbitkan sukuk (obligasi syariah) pada 2014, sebuah langkah yang mendapat sambutan positif dari pasar keuangan internasional (Wilson, 2019). Langkah ini bukan hanya dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan finansial komunitas Muslim di Inggris, tetapi juga sebagai upaya untuk menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah di dunia Barat. Kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 membawa pengaruh besar dalam praktik ekonomi syariah di Barat, khususnya dalam bidang keuangan digital atau fintech syariah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan big data, sistem ekonomi syariah di Barat juga mulai beradaptasi untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Blockchain, misalnya, dianggap sebagai solusi ideal untuk memastikan transparansi dalam transaksi syariah, karena setiap transaksi dapat dicatat dan diverifikasi secara publik dan permanen (Bakar & Razak,

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

2020). Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Beberapa perusahaan fintech di Barat, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, telah mulai mengembangkan platform yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah penggunaan platform peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah yang menghubungkan peminjam dengan investor secara langsung tanpa adanya bunga. Platform ini telah menarik minat berbagai kalangan di Barat, baik dari komunitas Muslim maupun non-Muslim, yang melihat manfaat ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Meskipun menunjukkan potensi besar, adopsi ekonomi syariah di Barat juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. beberapa elemen masyarakat Barat masih menganggap ekonomi syariah sebagai sesuatu yang eksklusif untuk umat Islam dan kurang memahami esensi etis yang mendasari sistem ini. Hal ini menciptakan hambatan psikologis yang membatasi partisipasi komunitas non-Muslim dalam pasar keuangan syariah. Di sisi lain, regulasi juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi syariah di Barat. Sistem keuangan syariah membutuhkan kerangka regulasi yang berbeda, mengingat prinsip-prinsipnya yang unik seperti larangan riba dan penerapan profit-sharing. Beberapa negara di Barat, terutama Amerika Serikat, belum memiliki regulasi yang jelas terkait keuangan syariah, sehingga menimbulkan keraguan bagi lembaga keuangan dan investor. Hal ini berbeda dengan Inggris yang telah memberikan dukungan regulasi yang lebih baik bagi pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam penerbitan sukuk.

Literatur juga mencatat adanya potensi besar bagi kolaborasi antara dunia Barat dan negara-negara Islam dalam memanfaatkan Revolusi Industri 4.0 untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, teknologi menjadi jembatan yang memungkinkan kedua pihak bekerja sama dalam inovasi produk keuangan syariah. Teknologi seperti blockchain dan AI dapat digunakan untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan transparan, yang dapat diterima baik oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Misalnya, perusahaan teknologi dari Barat dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah di negara-negara mayoritas Muslim untuk mengembangkan produk yang dapat diakses oleh konsumen di kedua belah pihak. Penelitian oleh Haneef dan Muhamed (2021) menunjukkan bahwa perusahaan

teknologi Barat dapat berkontribusi dalam menyediakan infrastruktur dan platform yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mempercepat adopsi keuangan syariah secara global. Kerja sama ini juga dapat mendukung inklusi keuangan di negara-negara berkembang melalui penyediaan produk keuangan digital yang etis.

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa dunia Barat mulai menyadari potensi ekonomi syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa negara Barat telah menunjukkan komitmen untuk mendukung perkembangan keuangan syariah, terutama dalam hal regulasi dan inovasi teknologi. Selain itu, dunia Barat melihat peluang ekonomi syariah sebagai cara untuk menarik investasi dari negara-negara mayoritas Muslim yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Respons dunia Barat terhadap ekonomi syariah di era Revolusi Industri 4.0 menunjukkan adanya minat yang signifikan, namun diiringi dengan tantangan regulasi, pemahaman budaya, dan adaptasi teknologi. Revolusi Industri 4.0 telah membuka peluang baru bagi ekonomi syariah di Barat, terutama melalui penerapan fintech dan teknologi blockchain. Sementara beberapa negara Barat, seperti Inggris, telah menjadi pelopor dalam penerapan keuangan syariah, tantangan regulasi dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang lebih erat antara Barat dan dunia Islam dalam pengembangan teknologi keuangan dapat mempercepat adopsi ekonomi syariah sebagai solusi keuangan global yang inklusif dan berkelanjutan (Gadis Diandono and Purbantina 2012).

Artikel yang berjudul *Diplomasi Diaspora Cina terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Cina (2017-2021)* membahas peran diaspora Cina dalam membangun hubungan diplomatik kedua negara. Diaspora Cina, sebagai komunitas besar yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat, memiliki pengaruh dalam hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara kedua negara. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Cina memanfaatkan jaringan diaspora untuk memperkuat diplomasi publik dan soft power-nya di Amerika Serikat. Selain itu, diaspora Cina juga berfungsi sebagai agen informal dalam memperbaiki citra Cina di mata publik Amerika. Penelitian ini menyoroti bahwa periode 2017-2021 menjadi fase penting dalam hubungan bilateral karena ketegangan politik yang meningkat, terutama terkait perdagangan dan keamanan. Diaspora Cina dipandang memainkan peran strategis dalam melobi pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap kebijakan luar negeri Cina dan peran diplomasi budaya yang

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

dijalankan oleh diaspora. Artikel ini juga mengkaji respons pemerintah Amerika terhadap pengaruh diaspora Cina, termasuk adanya kekhawatiran mengenai potensi pengaruh politik Cina melalui komunitas diasporanya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika diplomasi diaspora dalam konteks hubungan internasional yang kompleks (Ummah 2019).

Artikel yang berjudul "Alasan Amerika Serikat Keluar dari WHO Pada Saat Pandemi Covid 2020" membahas keputusan kontroversial yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump selama krisis kesehatan global. Salah satu alasan utama yang diangkat adalah ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap penanganan awal pandemi oleh WHO, terutama terkait keterlambatan organisasi tersebut dalam menyampaikan informasi krusial. Artikel tersebut juga menyoroti tuduhan bahwa WHO terlalu dipengaruhi oleh China dalam pengambilan keputusan, yang dianggap mempengaruhi respons global terhadap pandemi. Selain itu, Amerika Serikat merasa kontribusinya yang besar terhadap pendanaan WHO tidak diimbangi dengan pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan organisasi tersebut. Artikel ini juga menjelaskan bahwa keputusan ini dipandang sebagai langkah politik dalam konteks pemilihan presiden Amerika Serikat 2020. Keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional, yang menyatakan bahwa keluarnya Amerika dari WHO dapat memperlemah respons global terhadap pandemi. Secara lebih luas, artikel ini juga membahas dampak keputusan tersebut terhadap peran kepemimpinan Amerika Serikat di arena kesehatan global. Dalam literatur, terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana keluarnya Amerika dari WHO mempengaruhi diplomasi kesehatan global, serta bagaimana hal ini menambah ketidakpastian di tengah krisis. Berbagai sumber menyatakan bahwa meskipun terdapat kelemahan di WHO, keluar dari organisasi tersebut justru dianggap sebagai langkah yang kontra-produktif dalam menghadapi pandemi yang membutuhkan kerja sama internasional (Azhar 2022). Artikel yang berjudul "Konstruksi Komunikasi Internasional dalam Menyikapi Ipoeksosbudhankamnas" membahas tentang pentingnya komunikasi internasional dalam menghadapi berbagai isu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Penulis menyoroti bagaimana komunikasi internasional berperan sebagai jembatan dalam membangun diplomasi antarnegara, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Menurut beberapa literatur, komunikasi internasional bukan

hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga konstruksi narasi yang dapat memengaruhi persepsi global terhadap suatu negara. Dalam kajian ini, pendekatan multidisiplin sering digunakan, termasuk studi tentang diplomasi publik dan soft power. Artikel ini mengulas beberapa teori relevan, seperti teori komunikasi antarbudaya dan teori hubungan internasional yang menekankan pentingnya pemahaman lintas budaya. Selain itu, peran media massa dalam menyebarkan pesan-pesan diplomatik dan memperkuat citra negara juga dibahas secara mendalam. Literasi media menjadi penting dalam mendukung agenda Ipoleksosbudhankamnas. Beberapa studi kasus dalam artikel ini menunjukkan bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kerjasama antarnegara dalam menangani isu-isu krusial. Dengan pendekatan yang komprehensif, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara dapat mengelola dinamika internasional yang berdampak pada stabilitas nasional. (Erfan et al. 2024) Artikel berjudul "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia dalam Perdamaian Dunia)" membahas peran Indonesia dalam kancah politik internasional melalui kebijakan hukum dan diplomasi.

Literatur terkait siyasah dauliyah atau politik internasional sering kali menekankan pentingnya kebijakan luar negeri yang proaktif dan berlandaskan nilai-nilai moral. Artikel ini sejalan dengan pemikiran para sarjana seperti Mochtar Kusumaatmadja, yang menyoroti pentingnya hukum internasional dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Studi terdahulu juga menyebutkan peran Indonesia dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN dan PBB sebagai upaya untuk memperkuat posisi negara dalam perdamaian dunia. Selain itu, konsep "politik bebas aktif" yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Soekarno juga dibahas secara luas dalam literatur. Beberapa kajian lain menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keterlibatannya di arena internasional. Literatur yang lebih kontemporer sering menyoroti bagaimana hukum internasional memengaruhi hubungan antar bangsa dalam konteks globalisasi dan perubahan geopolitik. Artikel ini mengisi celah dengan menjelaskan kontribusi spesifik Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui pendekatan hukum dan politik. Pendekatan hukum Indonesia yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik internasional menjadi sorotan penting dalam berbagai tinjauan literatur. Secara keseluruhan, artikel ini

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

menawarkan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur terkait hukum dan politik internasional dengan fokus pada peran Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel berjudul " Perang Dagang: Dampak Politik Perang Dagang Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia," penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan literature review sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah terkait. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi beragam perspektif akademis tentang bagaimana perang dagang berdampak pada ekonomi syariah di Indonesia dan bagaimana propaganda digunakan dalam konflik ekonomi internasional. Dengan meninjau teori-teori yang sudah ada, seperti hubungan antara ekonomi dan politik global, serta menganalisis kasus-kasus perang dagang historis dan kontemporer, literature review ini membantu membangun kerangka teoretis yang kuat. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan wawasan tentang dinamika geopolitik yang memengaruhi perdagangan internasional dan cara propaganda mempengaruhi persepsi publik serta kebijakan luar negeri, sehingga memperkaya diskusi mengenai topik yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang dagang AS-China membawa ketidakpastian yang signifikan di pasar global, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian ini berdampak pada sentimen investor terhadap saham syariah di Indonesia, khususnya saham-saham yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Saham syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan menghindari unsur riba dan spekulasi berlebihan, sebenarnya memiliki potensi stabilitas yang lebih baik dalam kondisi pasar yang normal. Namun, ketegangan dagang yang terjadi menyebabkan fluktuasi besar dalam harga saham syariah, khususnya pada sektor-sektor yang terkait erat dengan ekspor dan komoditas, seperti sektor pertanian, energi, dan pertambangan. ketegangan perdagangan ini menurunkan kepercayaan investor pada saham syariah yang berorientasi ekspor, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap permintaan dari China. Penurunan harga komoditas dan volatilitas nilai tukar akibat perang dagang memperburuk kinerja sektor-sektor ini, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap pasar saham syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang membuat investor syariah lebih berhati-hati dan cenderung menahan dana mereka dalam jangka pendek, sehingga mengurangi likuiditas pasar.

Sektor komoditas di Indonesia sangat terpengaruh oleh ketegangan antara AS dan China. Sebagai negara dengan banyak komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batubara, dan karet, Indonesia memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap permintaan dari China. Ekonomi syariah, yang mencakup aktivitas perdagangan yang memenuhi syariah, mengalami dampak langsung dari penurunan permintaan komoditas ini karena banyak perusahaan berbasis syariah yang bergantung pada sektor ini. Saham syariah di sektor pertanian dan energi menunjukkan penurunan nilai selama perang dagang, terutama karena penurunan harga ekspor ke China. Harga komoditas seperti batubara dan kelapa sawit sangat sensitif terhadap permintaan global, khususnya dari negara besar seperti China. Ketika permintaan dari China menurun akibat ketidakpastian dagang dengan AS, harga komoditas ini cenderung mengalami tekanan, yang berdampak langsung pada kinerja saham syariah di sektor-sektor terkait di Indonesia. Hal ini memberikan tantangan bagi perusahaan-perusahaan berbasis syariah yang bergerak di bidang komoditas, karena mereka harus menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan operasional di tengah tekanan pasar global. Dampak ini tidak hanya dirasakan pada saham syariah, tetapi juga merambah pada berbagai sektor ekonomi syariah lainnya yang berkaitan dengan komoditas.

Perang dagang AS-China juga berdampak pada ketidakstabilan nilai tukar, yang berimbas pada ekonomi syariah di Indonesia. Ketika ketegangan dagang meningkat, terjadi tekanan besar pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspor dan impor. Hal ini berdampak signifikan pada saham-saham syariah di sektor-sektor yang memerlukan bahan baku impor atau berorientasi pada ekspor. Fluktuasi nilai tukar rupiah membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi, sementara pendapatan dari ekspor menjadi tidak stabil karena ketidakpastian permintaan dari pasar global. Fluktuasi nilai tukar ini menjadi perhatian bagi perusahaan berbasis syariah yang berusaha mengelola keuangan dengan prinsip keuangan Islam. Menurut beberapa penelitian, ketidakstabilan nilai tukar akibat perang dagang mengurangi minat investor untuk berinvestasi pada saham-saham syariah yang terpapar pada risiko valuta asing. Ketidakstabilan nilai tukar mengurangi daya tarik

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

investasi pada saham syariah di sektor-sektor yang membutuhkan stabilitas ekonomi untuk menjalankan operasi sesuai prinsip syariah. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana mereka, dan ini berdampak pada likuiditas pasar saham syariah di Indonesia. Meskipun ekonomi syariah terpapar dampak negatif dari perang dagang, sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat memberikan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip kehati-hatian dan transparansi merupakan faktor penting yang dapat memberikan stabilitas di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Sebagai contoh, saham syariah yang berfokus pada sektor-sektor riil dan tidak melibatkan transaksi berbasis bunga atau spekulasi tinggi memungkinkan ekonomi syariah bertahan dalam jangka panjang, meskipun ada ketidakpastian eksternal.

Saham syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih baik terhadap volatilitas global dibandingkan dengan saham konvensional, karena keterlibatan sektor riil yang lebih besar dalam portofolio investasi syariah. Hal ini memberikan nilai tambah bagi investor yang mencari stabilitas di tengah fluktuasi pasar global. Meskipun demikian, ketahanan ini tidak berarti bahwa saham syariah tidak terpengaruh sama sekali oleh ketegangan perdagangan global, tetapi menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi alternatif investasi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Dampak perang dagang terhadap ekonomi syariah di Indonesia juga memicu pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan guna mendukung pertumbuhan sektor ini. Salah satu implikasi penting dari perang dagang adalah meningkatnya kebutuhan Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada negara tertentu seperti China atau AS. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini berarti mendorong perusahaan syariah untuk mengembangkan pasar baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif untuk mendukung perusahaan berbasis syariah di sektor-sektor yang terdampak perang dagang, seperti sektor pertanian dan energi. Pentingnya kebijakan dukungan dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tetap berkelanjutan meskipun ada ketidakpastian global. Kebijakan insentif fiskal dan peningkatan literasi keuangan syariah

di Indonesia juga dianggap sebagai langkah penting untuk menarik minat investor dan meningkatkan partisipasi dalam pasar saham syariah.

Secara keseluruhan, perang dagang antara AS dan China memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks pasar saham syariah dan sektor-sektor terkait. Ketegangan perdagangan ini menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi sentimen investor, menyebabkan volatilitas harga komoditas, dan menekan nilai tukar rupiah. Sektor-sektor yang terkait erat dengan ekspor, seperti pertanian dan energi, merasakan dampak langsung dari penurunan permintaan global dan fluktuasi harga komoditas. Meskipun demikian, ekonomi syariah memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan ketahanan, terutama karena prinsip-prinsip yang menekankan transparansi dan kehati-hatian. Dampak politik perang dagang ini menunjukkan perlunya kebijakan dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kebijakan insentif bagi perusahaan berbasis syariah dan upaya untuk mendiversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar yang terlibat dalam perang dagang. Di sisi lain, investor yang mencari stabilitas jangka panjang mungkin dapat melihat ekonomi syariah sebagai alternatif investasi yang lebih sesuai dengan prinsip etis dan stabilitas yang diinginkan. Perang dagang AS-China menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perang dagang AS-Tiongkok menunjukkan dampak yang mendalam terhadap ekonomi syariah di Indonesia, terutama melalui fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, dan sentimen pasar. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketegangan dagang ini menjadi tantangan besar bagi sektor saham syariah, meskipun prinsip-prinsip syariah yang berbasis pada kehati-hatian menawarkan potensi stabilitas yang lebih baik dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan dukungan, seperti insentif dan diversifikasi pasar, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar dan

PERANG DAGANG: DAMPAK POLITIK PERANG DAGANG TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

memperkuat ketahanan ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.

Saran

Penelitian ini hanya membahas dampak perang dagang terhadap ekonomi syariah di Indonesia saja, untuk penelitian selanjutnya dapat memperbaharui pembahasan mengenai bagaimana Ekonomi syariah di Indonesia dapat terus mempertahankan kestabilan ekonominya ditengah krisis apapun yang terjadi di dunia dengan menjelaskan faktor-faktor dan bentuk kebijakan yang efektif untuk menjaga kestabilan Ekonomian syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. 2021. "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2):220. doi: 10.47453/ecopreneur.v2i2.311.
- Azhar. 2022. "Konstruksi Komunikasi Internasional Dalam Menyikapi Ipoleksosbudhankamnas." *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen* 10(1):10–22.
- Erfan, Zainul, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi'in. 2024. "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):767–87. doi: 10.62976/ijijel.v2i2.552.
- Gadis Diandono, Imanniar, and Adiasri Putri Purbantina. 2012. "Diplomasi Diaspora Cina Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Cina (2017-2021)." *Intermestic: Journal of International Studiese* 6(2):398–421. doi: 10.24198/intermestic.v6n2.8.
- Hadi, Nor, Aminatul Malikhah, and Atieq Amjadallah Alfie. 2020. "Dampak Trade War Amerika Serikat VS China Terhadap Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(2):193. doi: 10.21043/equilibrium.v8i2.8047.
- Natalia, Irene. 2020. "Pengaruh Pasar Saham Amerika Serikat, Tiongkok Dan Indonesia Selama Perang Dagang 2018-2020." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 3(2):95–108. doi: 10.29303/akurasi.v3i2.49.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Amerika Serikat Keluar Dari WHO Pada Saat Pandemi Covid 2020." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.